BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan narkoba saat ini sedang melanda seluruh pelosok tanah air, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah hingga pegawai negeri sipil, bahkan politisi dan aparat penegak hukum pun tidak efektif dalam menghadapi pecandu narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahguna dan peredaran narkotika.¹

Penegak kejahatan terkait narkotika dilakukan secara luas oleh penegak hukum dan menjadi subjek dari banyak keputusan pengadilan. Meskipun terdapat peraturan hukum yang jelas, distribusi obat-obatan terlarang di Indonesia tidak dibatasi. Kasus penyalahgunaan narkoba tidak boleh terus berlanjut. Sebab meningkatnya perkembangan narkoba tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental pengguna narkoba.² Permasalahan peredaran dan pemakaian narkoba terus terjadi dari tahun ke tahun di Indonesia dan sangat meningkat. Sistem pemidanaan di Indonesia telah mengatur secara keseluruhan melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP menjadi dasar utama

¹ Dewi Untari Dewi and Nys. Arfa, 'Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.1 (2021), hlm.138–49 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8313>>.

² M.Zikron, Haryadi, Yulia Monita, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *PAMPAS: Journal of criminal law*, 3.3 (2022), hlm. 349

dari kedudukan berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:³

1. pidana pokok
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda
2. pidana tambahan;
 1. pencabutan hak hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim

Berkenaan dengan jenis-jenis kejahatan tersebut di atas, maka pidana penjara merupakan tindak pidana yang sangat populer bagi pembuat Undang-Undang ketika memberikan ancaman pidana dan bagi hakim ketika menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Pidana penjara dianggap sebagai bentuk hukuman paling efektif yang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dalam hukum positif Indonesia sendiri, tindak pidana jenis ini merupakan tindak pidana yang paling terancam dalam berbagai ketentuan pidana.⁴

Tindak pidana atau pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar hukum sehingga dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan itu, harus dapat membedakan

³ R. Soenarto Soedibtro, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensial Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 16.

⁴ Nenek Suparni, *eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan*, Ed. 1., Cet. 2, Jakarta; Sinar Grafika, 2007, hlm. 40.

perbuatan pidana dan bukan perbuatan pidana. Menurut Teguh Prasetyo, Tindak Pidana Merupakan “Perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.⁵ Jadi, tindak pidana narkoba merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana dengan menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh Undang-Undang yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.

Selain mengakui perampasan kemerdekaan sebagai hukuman pidana, KUHP juga mengakui pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok. Hukuman pidana pada pada hakekatnya bersifat perdata, yaitu apabila seseorang dirugikan berhak meminta ganti rugi .Besarnya ganti rugi tergantung pada tingkat kejahatan yang diderita, serta status sosial orang tersebut. Pihak berwenang kemudian mengklaim juga sebagai bagian dari pembayaran tambahan atas intervensi pemerintah di pengadilan atau untuk tindakan pemerintah terhadap pihak-pihak yang memicu kerusuhan.⁶

Pidana penjara dan pidana kurungan dianggap sebagai alat pencegah yang paling menyakitkan dan paling efektif bagi para penjahat. Berdasarkan temuan Mahkamah Agung, sebelumnya pemberitahuan denda dalam kasus narkoba dianggap tidak dipenuhi karena denda yang tinggi tidak dilakukan oleh terpidana diperkirakan

⁵ Niko Saputra and Tri Imam Munandar, ‘Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah’, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3 (2022), 51–61.

⁶ Syaiful Bakri, *Perkembangan Stesel Pidana Denda Indonesia*, Total Media ,Jakarta,2009,hlm.129-130.

harus membayar. Denda tidak tercapai jika terpidana menginginkan hukuman penjara. Dalam Undang – Undang no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tercantum angka – angka jumlah pidana denda yang harus dibayarkan, yang mana jumlah tersebut relatif tinggi, Dan dalam pasal 148 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa apabila pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana persekutor narkotika tidak dapat membayarkan denda yang telah diberikan maka dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 2 (dua) Tahun penjara. Hal ini tentu memberikan pilihan bagi terpidana yang tentunya tidak sebanding dengan denda yang harus diyarkan, bahkan pidana penjara yang diberikan relatif singkat.⁷

Dalam hal ini Pidana Denda adalah pembayaran sejumlah uang sebagai ganti kerugian atas pelanggaran tersebut. Salah satu pelanggaran yang diancam dengan pidana denda adalah pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Kejahatan yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba bersifat formal dan tindakan tersebut dapat dihukum. Oleh karena itu, hakim lebih cenderung menjatuhkan hukuman penjara, namun tergantung dari kejadian yang dilakukan pelaku, hakim juga dapat menggantinya dengan hukuman denda.

Terdapat dalam Undang-Undang Narkotikamemperberat ancaman pidana baik pidana penjara maupun pidana denda bagi pelaku Narkotika . Ancaman pidana denda bagi pelaku narkotika dalam Undang-Undang Narkotika dapat dilihat pada BAB XV tentang ketentuan pidana yakni mulai pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal

⁷ Danang Wisnu Santoso and Mitro Subroto, 'Efektifitas Pemberian Denda Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 10, No 2 (Mei 2022), hlm. 132–34. <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46820>>.

114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 137 dan Pasal 147. Pada pasal-pasal tersebut, pidana denda diancamkan dengan pola ancaman kumulasi pidana denda dengan pidana penjara. Model perumusan ancaman pidana denda yang digunakan dalam pasal-pasal tersebut dapat dibagi menjadi dua model perumusan yakni model perumusan denda tanpa minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 129 serta model perumusan ancaman pidana denda dengan aturan mengenai minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 132, Pasal 137 dan Pasal 147.

Penggolongan narkotika sebagai materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun tentang narkotika ,yang membagi tiga bagian golongan narkotika.penggolongan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika termuat dalam pasal 6 ayat 1 penjelasan umumnya yaitu :

- a. Narkotika golongan I, yaitu obat-obatan yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki tingkat kecanduan yang sangat tinggi.
- b. Narkotika golongan II adalah zat narkotika yang efektif secara terapi yang digunakan sebagai upaya terakhir dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi kecanduan yang sangat tinggi.

- c. Narkotika golongan III adalah zat narkotika yang mempunyai khasiat terapeutik dan banyak digunakan dalam terapi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi adiksi ringan.

Di Pengadilan Negeri Jambi tercatat banyak kasus pidana narkoba dengan bukti ditangkapnya sejumlah warga Jambi yang terlibat dalam pengedar dan pengguna. Beberapa orang yang ditangkap karena kejahatan narkoba telah dijatuhi hukuman penjara dan denda oleh hakim, dengan syarat jika tidak mampu membayar denda tersebut, dapat diganti dengan hukuman penjara.

Berikut ini diperlihatkan beberapa banyak tindak pidana narkoba yang membayar pidana denda di Kejaksaan Negeri Jambi :

Tabel I.
Data Perkara Tindak Pidana Narkotika
Yang Membayar Dan Tidak Membayar Pidana
Denda Di Kejaksaan Negeri Jambi

Tahun Perkara	Jumlah Perkara	Yang Membayar Denda	Yang Tidak Membayar Denda
2020	521	0	521
2021	530	0	530
2022	276	0	276

Sumber: kejaksaan negeri jambi

Dari banyak nya kasus narkoba pada table di atas pada tahun 2020 sebanyak 521 ,tahun 2021 sebanyak 530,dan pada tahun 2022 sebanyak 276,pelaku kejahatan tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Jambi.dengan jumlah kasus narkoba

baik segi pengedar dan pemakai tidak ada satupun pelaku kejahatan membayar uang denda atau piadana denda di kejaksaan negeri jambi dikarenakan jumlah denda yang sangat tinggi sehingga pelaku memilih pidana pengganti yaitu pidana penjara.

Berikut ini diperlihatkan beberapa putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika yang diputus oleh pengadilan negeri jambi . Putusan pidana denda yang dijatuhkan kebanyakan dalam jumlah yang tinggi dengan masa pidana penjara pengganti yang terbilang singkat.

Tabel II.

Penjatuhan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana
Narkotika Pada Beberapa Putusan Pengadilan
Negeri Jambi

Nomor Putusan	Pasal yang dilanggar dalam UNDANG-UNDANG Narkotika	Pidana Penjara	Pidana denda (dalam rupiah)		Pidana penjara pengganti
			Tuntutan	Putusan	
471/Pid.Sus/2020/PN Jmb	Pasal 112 ayat (1)	5 tahun	800.000.000	800.000.000	3 bulan
824/Pid.Sus/2020/PN Jmb	Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)	9 tahun	1.000.000.00	1.000.000.000	3 bulan
674/Pid.Sus/2021/PN Jmb	Pasal 112 ayat (2)	5 tahun	1.000.000.000	1.000.000.000	3 bulan

552/Pid.Sus/ 2022/PN Jmb	pasal 114 ayat (2)	8 tahun	1.000.000.000	1.00.000.000	7 bulan
566/Pid.Sus/ 2021/PN Jmb	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)	11 tahun	1.000.000.000	1.000.000.000	1tahun
650/Pid.Sus/ 2021/PN Jmb	Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)	8 tahun	1.000.000.000	1.000.000.000	6 bulan
490/Pid.Sus/ 2021/PN Jmb	Pasal 114 ayat (1)	8 tahun	1.000.000.000	1.000.000.000	1 bulan

Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan kenyataan di atas, hakim cenderung menjatuhkan denda yang nominalnya tinggi dengan memasukkan hukuman alternatif, biasanya hukuman penjara singkat, yang harus dijalani jika pelaku tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya melainkan lebih memilih pidana penjara pengganti. pidana penjara berupa kurungan sebagai pengganti pidana denda menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana narkoba dibandingkan harus kehilangan uang dalam jumlah yang cukup besar, penyebab lainnya kerana tidak terdapat pasal yang mengatur tindak paksaan atau daya paksa terhadap terpidana yang tidak dapat atau tersedia membayar pidana denda sebelum akhir batas waktu yng ditetapkan.

Dengan begitu penyalahguna narkotika tidak memberikan efek jera bahkan adanya kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya.

Dengan begitu negara tidak ada pemasukan dalam pidana denda dalam kasus tindak pidana narkotika, Padahal pidana denda tersebut apabila di bayarkan oleh terpidana, maka uang tersebut menjadi PNBPN yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur negara .

Dengan itu perlu mendapat perhatian serius mengingat dapat mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pidana denda bagi pelaku narkotika. Secara tidak langsung, hal tersebut juga akan berimplikasi pada keberhasilan tujuan yang ingin dicapai oleh perumus Undang-Undang dalam mengancam pidana denda pada Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Jambi)** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka masalah yang akan di teliti adalah mengenai efektivitas penjatuhan pidana denda terhadap tindak pidana narkotika. Untuk itu secara khusus akan di kaji tentang :

1. Bagaimana pelaksanaan pidana denda terhadap tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi ?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat pidana denda tidak terlaksanakan di Kejaksaan Negeri Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana denda terhadap tindak pidana narkoba Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi.
2. Untuk mengetahui penyebab pidana denda tidak terlaksanakan Di Kejaksaan Negeri Jambi

D. Manfaat Penelitian

1. manfaat teoritis

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana di masa akan datang. Selain itu penelitian ini dapat berguna untuk menjadi referensi kepada penelitian berikutnya yang berhubungan dengan efektivitas pidana denda dalam penegakan tindak pidana narkoba.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam dengan efektivitas pidana denda dalam penegakan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas Adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat

keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.⁸

2. Pidana denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga dalam hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda tersebut telah diancamkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik sebagai satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana pokok tersebut secara bersama-sama.⁹

3. Penegakan hukum

Munir Fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan mengejawantah, sikap tindak sebagai suatu rangkaian pejabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Mempermudah, Munir Fuady merumuskan penegakan hukum adalah segala segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian dapat terlaksana suatu tujuan hukum ke dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan,

⁸ W.Yudho dan H.Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, 1987. hlm 59.

⁹ PAF .Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 78-79

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, 1998, hlm. 67

kesebandingan,kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain sebagainya.

Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa penegakan hukum itu sudah dapat dimulai ketika peraturan hukum itu dibuat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan yang berujung pada tercapainya nilai-nilai bagi kehidupan masyarakat yang ideal. Pikiran-pikiran hukum tersebut akan menentukan bagaimana hukum itu nantinya akan ditegakkan.¹¹

4. Tindak pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika Dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika.¹²Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Narkotika. Hal tersebut diatur dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Pengertian narkotika di jelaskan dalam pasal 1 angka 1 undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi samapai meghilangkan rasa nyeri dapat menimbulkan kergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan”.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 24

¹² Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia,Jakarta, 2004.hlm 41.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Pidana

Pidana menurut Andi Hamzah merupakan suatu penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman yang bahasa Belanda disebut *Straftoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *Sentencing*.¹³ Sehingga pidana adalah suatu penjatuhan pidana atau hukuman bagi yang melanggar undang-undang.¹³

Teori pidana yang dianut di Indonesia adalah teori pidana yang sesuai dengan sistem hukum eropa kontinental. Apabila kita lihat maka terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penerapan sanksi pidana yakni terdapat 3 (tiga) teori

a. Teori *absolut* atau teori pembalasan

Teori ini memberikan pernyataan bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar penerapannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan

¹³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung., 2010.hlm.21.

sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.¹⁴

b. Teori *relatif* atau teori tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the "reductive" point of view*) karena dasar pembedaan pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.¹⁵

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering disebut teori tujuan. Dasar pembedaan adanya pidana adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Tujuan pemidanaan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.hlm.4.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arie, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. PT. Alumni. Bandung., 2005.hlm.16

kejahatan

- 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁶

c. Teori gabungan

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lambroso, yang menyatakan tujuan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, sehingga menurut aliran ini tujuan dari pemidanaan adalah bersifat plural, disatu sisi pidana itu dimaksudkan sebagai pengimbangan atau pembalasan atas dilakukannya kejahatan, disisi lain pidana itu juga dimaksudkan sebagai prevensi baik yang bersifat umum maupun khusus. Teori ini mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus “*retribution*” dan yang bersifat “*utilitarian*”, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai sarna-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Teori ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

¹⁶ PAF.Lamintang dan Theo Lamintang.*Op.cit*

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu Undang-Undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang

dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan1 dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka ketidakefektifan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.¹⁸ Undang-Undang

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.hlm.8.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115.

dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-Undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan Undang-Undang.¹⁹

G. Orisinalitas Penelitian

1. sahrul tesis, universitas medan 2020 penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum pengadilan negeri medan Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah tempat dan daerah melakukan penelitian yang berbeda dimana skripsi sahrul pengadilan negeri medan Yang pelakunya prajurit TNI menyentuh dan merambah narkoba dan skripsi penulis di Kejaksaan negeri jambi Jambi yang pelakunya rata masyarakat jambi.
2. Sulaiman skripsi, universitas Hasanudin makasar 2021 tinjauan yuridis pelaksanaan pidana penjara pengganti pidana denda dalam tindak pidana narkoba, Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah penegakan hukum terhadap pidana denda yang masih menjadi pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan No.29/Pid.Sus/2019/PN. Sedangkan Skripsi ini lebih ke penerapan pidana denda dalam tindak narkoba di Kejaksaan negeri jambi.
3. Chintya Nandasari Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung pinang 2023 Analisis Pidana Penjara Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/Pn.Tpg)

¹⁹ *Ibid* hlm 19

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi chintya hanya membahas satu putusan, sedangkan skripsi ini membahas tentang efektivitas pidana denda di Kejaksaan negeri jambi.

H. Metode Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci hlm-hlm yang akan dibahas dalam proposal ini. Adapun sistematika penulisan digunakan sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian dengan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian berupa studi lapangan yang berbasis data primer untuk menemukan teori tentang proses terjadinya hukum dan proses beroperasinya hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi target pada penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sumber yang didapat adalah data yang berkaitan dengan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data diantaranya yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung member data pada pengumpulan datangnya.baik dalam segi pemberitahuan ataupun wawancara terhadap jaksa di kejaksaan negeri jambi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ada kaitannya dnegan penulisan proposal skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari literatur-literatur dan bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan proposal skripsi ini.
- 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Menurut Bahder Johan Nasution terkait dengan populasi dalam suatu penelitian ilmiah yaitu : “Seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu,tempat,gejala-gejala,pola sikap,tingkah laku dan

sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.²⁰

Adapun populasi dalam metodologi penelitian kejaksaan negeri jambi

b. Sampel

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengampilan sampel menurut tujuan tertentu yang dipilih sendiri oleh peneliti dengan memperhatikan kriteria dan karakteristik tertentu, maka sampel dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kasipidsus kejaksaan Negeri Jambi
- b. 2 (Dua) orang jaksa pidum kejaksaan Negeri jambi
- c. 2 (Dua) orang staf pidum kejaksaan Negeri Jambi

5. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan studi dokumen.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu tanya jawab langsung antara penulis dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.

- b. Studi Dokumen yaitu pengumpulan data dengan mempelajari data-data dari kejaksaan negeri jambi.

6. Pengolahan dan analisis data

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 145.

Data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan, kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang dapat memecahkan masalah yang diteliti, dan kemudian diambil kesimpulan penelitian ini. Metode analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, yang kemudian dihubungkan dengan teori atau literatur yang relevan tentang masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penelitian proposal ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada dan akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk lebih terarah penulisan proposal ini, maka penulis menyusunnya dalam empat bab, tiap-tiap bab diuraikan lagi ke dalam bagian-bagian sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan penulis mengurai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab tentang efektivitas, pidana denda, tindak pidana narkotika, dan narkotika

BAB III PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan dengan jelas tentang efektifitas pidana denda dalam penegakan hukum tindak pidana denda (studi Kejaksaan negeri jambi)

BAB IV PENUTUP

Pada bab trakhir ini berisikan kesimpulan dari uraian yang bertuang dalam bab sebelumnya dan memuat saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan.